***Mata Kuliah : Diplomasi dan Negosiasi***

***Dosen : Andrias Darmayadi, M.Si***

**Diplomasi dan Politik Luar Negeri**

Diplomasi adalah seni dan praktek ber[negosiasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi" \o "Negosiasi" \t "_blank) oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah [negara](http://id.wikipedia.org/wiki/Negara) atau [organisasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi). Kata diplomasi sendiri biasanya langsung terkait dengan diplomasi internasional yang biasanya mengurus berbagai hal seperti [budaya](http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya" \o "Budaya" \t "_blank), [ekonomi](http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi), dan [perdagangan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan" \o "Perdagangan" \t "_blank). Biasanya, orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus.

Diplomasi juga diartikan sebagai kepandaian berbicara, ketajaman berfikir, untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Sehingga semakin pandai seseorang berbicara dan ‘mengendalikan’ pikiran orang lain, akan semakin lihai orang itu dalam berdiplomasi. Oleh karenanya, diplomasi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena kita akan berhadapan dengan pikirang manusia yang berbeda-beda dan sulit ditebak. Mungkin pengertian diplomasi ini hampir memiliki makna yang mirip dengan manipulasi, hanya saja kata manipulasi memiliki konotasi yang lebih negatif dibandingkan diplomasi.

Sejarah perkembangan dimulainya diplomasi telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Perkembangan yang paling terasa mungkin dirasakan pada masa polis-polis Yunani kuno. Pada masa itu, seringkali terjadi pengiriman utusan antar polis, yang menyangkut banyak hal, seperti perjanjian dua negara, pertukaran tawanan, pemberian hadiah, dan masih banyak lagi. Hal serupa juga kita temui pada masa Peradaban Mesir kuno.

Diplomasi yang paling sederhana dan tertua adalah [diplomasi bilateral](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplomasi_bilateral&action=edit" \o "Diplomasi bilateral" \t "_blank) antara dua pihak dan biasanya merupakan misi dari [kedutaan besar](http://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan_besar" \o "Kedutaan besar" \t "_blank) dan [kunjungan kenegaraan](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunjungan_kenegaraan&action=edit). Contohnya adalah [Persetujuan Perdagangan Bebas Kanada-Amerika](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Persetujuan_Perdagangan_Bebas_Kanada-Amerika&action=edit" \o "Persetujuan Perdagangan Bebas Kanada-Amerika" \t "_blank) antara [Amerika Serikat](http://id.wikipedia.org/wiki/Amerika_Serikat) dan [Kanada](http://id.wikipedia.org/wiki/Kanada).

Jenis lainnya adalah [diplomasi multilateral](http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplomasi_multilateral&action=edit" \o "Diplomasi multilateral" \t "_blank) yang melibatkan banyak pihak dan bisa ditelusuri dari [Kongres Wina](http://id.wikipedia.org/wiki/Kongres_Wina" \o "Kongres Wina" \t "_blank). [PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/PBB" \o "PBB" \t "_blank) adalah salah satu institusi diplomasi multilateral. Beberapa diplomasi multilateral berlangsung antara negara-negara yang berdekatan atau dalam satu region dan diplomasi ini dikenal sebagai diplomasi regional.

Diplomasi dan politik luar negeri bagaikan dua sisi mata uang. Saat dilihat dalam ranah hubungan internasional, diplomasi tidak akan ada tanpa kehadiran politik luar negeri, dan politik luar negeri tidak akan dapat berjalan tanpa adanya diplomasi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan instrumen utama dalam politik luar negeri. Jika dianalogikan, diplomasi bagaikan sebuah pedang yang digunakan dalam pertarungan. Semakin tajam pedang tersebut, maka akan semakin mudah kita dapat mengalahkan lawan-lawan kita dan memperoleh kemenangan, begitu pun sebaliknya. Sama halnya dengan diplomasi, semakin baik dan semakin ‘tajam’ diplomasi yang digunakan, maka politik luar negeri yang dilakukan pun akan semakin lancar.

**Politik Luar Negeri**

# Konsep Dasar Politik Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri, pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan *“action theory”*, atau kebijakan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu intrenasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. *Policy* itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Pemahaman konsep ini diperlukan agar kita dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik (dalam negeri). Tidak dapat dipungkiri pula bahwasanya pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam negeri. Meminjam istilah Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, menyatakn bahwa “*foreign policy begins when domestic policy ends*”[[1]](#footnote-1) dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada *intersection* antara aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapa menisbikan struktur dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik.

**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Politik Luar Negeri**

1. Kepentingan utama suatu negara yang tidak akan berubah dalam jangka panjang.

Dalam faktor ini poin penting yang dapat mempengaruhi adalah faktor ideologi suatu negera yang dianut ataupun yang tidak. Kejadian besar yang dapat dijadikan sebagai contoh adalah saat runtuhnya komunisme pada tahun 1991, muncul dan berkembangnya pasar sosialis yang dianut oleh China, Kuba, dan Vietnam sejak tahun 1911, dan munculnya demokrasi di Eropa Timur, mulai tahun 1989. Sebelum ataupun sesudahnya transformasi ideologi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut sama-sama memfokuskan segala kegiatan negara sesuai dengan kepentingan vital negara yang telah di deskripsikan. Sebagai contoh yang lebih jelas adalah pada saat Perang Dingin, Moscow melakukan hubungan yang baik dengan Mesir karena merupakan negara yang menguasai Terusan Suez dimana banyak kapal barang dagang Rusia yang lalu-lalang melewati Terusan Suez tersebut. Walaupun dalam melakukan hubungan baik dengan Mesir tersebut tidak sesuai denga ideologi komunisme yang dianut.

2. Sistem Kepercayaan yang mempengaruhi terbentuknya kepentingan vital suatu negara.

Yang dimaksud dengan sistem kepercayaan yang mempengaruhi terbentuknya kepentingan vital suatu negara bisa dikatakn sebagai ideologi yang dianut. Untuk lebih jelasnya pada masa Perang Dingin dimana ideologi Uni Soviet dengan komunis dan Amerika Serikat denga liberal deomkrasinya dapat membentuk dunia menjadi bipolar dalam sitem internasonal anatara Moscow dan negara barat yang membuat kedua negara berada pada keadaan saling tegang satu sama lain dan ketakutan untuk menyerang (deterens). Selain membuat dunia menjadi bipolar pada kepercayaan Amerika Serikat lebih beroperasi pada prinsip moralitas, nilai-nilai demokrasi,dan pentingnya pasar ekonomi, akan tetapi lain halnya dengn Uni Soviet yang lebih memfokuskan pada sistem komunis atheis yang tidak bermoral yang sangat berlawanan denga Amerika Serikat. Poin penting yang dapat diambil adalah disini adalah tafsiran suatu negara bagaimana mereka akan mengejar *national interest* suatu negara melalui sistem kepercayaan (ideologi) yang dianut.

3. Pengejaran cita-cita suatu negara yang bertubrukan dengan kepentngan negara lain.

Jadi dalam pengejaran cita-cita suatu negara ataupun *national interest*-nya tidak akan ada halangannya bahkan bisa saling bertubrukan satu sama lain yang lebih pada bagian keamanan wilayah, kekuatan ekonomi, kebebasan politik. Kasus besar yang dapat menjadi salah satu contohnya adalah saat Irak menyrang Kuwait. dalam penyerangan tersebut lebih menekankan kepentingan Irak dalam bidang ekonomi yaitu penguasaan lahan minyak di Kuwait oleh Irak, akan tetapi secara langsung penyerangan tersebut juga membawa pengaruh pada penguasaan wilayah dan kebebasan berpolitik pada newgara Kuwait. Jadi inti yang dapat diambil adalah dalam politik luar negeri suatu negara bisa saja mengurangi atau bahkan menghancurkan poltiik luar negeri negara lain.

4. Perubahan politik luar negeri untuk pencapaian kepentingan vitalnya

Negara dapat merubah kebijakan spesifik setiap waktu sesuai dengan keadaan yang ada khususnya pada bidang wilayah. Dalam hal ini kepentingan vital suatu negara bersifat konstan atau tetap akan tetapi politik luar negerinya akan berubah sesuai dengan perkembangan keadaan yang ada sehingga keamanan wilayah, kekuatan ekonomi dan kebebasan bepolitik dapat tercipta kembali.

5. Sasaran-sasaran politik luar negeri tidak mudah dikoordinasikan, terutama dalam negara-negara yang demokratis.

Permasalahan pembuatan politik luar negeri di negara-negara demokratis adalah terdapatnya lebih dari satu suara. Kesulitan-kesulitan dalam negara demokrasi mencakup kebutuhan untuk merahasiakan politik luar negeri yang bertentangan dengan asas keterbukaan dan hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat, pembagian *institutional power* yang menciptakan mekanisme *check and balance*, serta opini publik, pres, dan lobi-lobi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan.

6. Politik luar negeri dapat lebih merupakan konsekuensi dari perjuangan untuk mencapai power dalam negeri

Hal ini didasarkan pada hasil persepsi objektif mengenai dunia eksternal yang dikoordinasikan secara rasional. Dalam sistem yang demokratis, organisasi-organisasi, kelompok kepentingan, dan departemen-departemen pemerintahan sering terjebak dalam pertentangan mengenai politik luar negeri apa yang harus diambil. Organisasi-organisasi yang terlibat dalam pembuatan politik luar negeri ini mendefinisikan kepentingan vital sesuai dengan kepentingan organisasional masing-masing.

1. Wolfram F. Hanrider. 1971. *Comparative Foreidn Policy: Theoretical Essays*. New York: David McKay Co., hal. 22 dalam Dr. Anak Agung Banyu P. dan Dr. Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005), hal.48 [↑](#footnote-ref-1)